

Perlindungan, penegakan dan problematika hak asasi manusia di Indonesia

Akhmad Munir

Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: akhmadadi1927@gmail.com

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia;
Kasus Pelanggaran; Perlindungan;
Penyelesaian

Keywords:

Human rights;
Violation Cases; Protection;
Settlement;

ABSTRAK

Permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi permasalahan yang relevan dan signifikan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi ketika hak-hak dasar individu diabaikan, tidak dilindungi, atau tidak ditegakkan oleh negara atau lembaga lain. Di Indonesia, terdapat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum ditangani atau diselesaikan secara memadai. Amnesty International Indonesia melaporkan bahwa pelanggaran serius ini diatur oleh Statuta Roma, sebuah perjanjian internasional yang diawasi oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Namun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma. Di

tingkat nasional, terdapat dua undang-undang yang mengatur permasalahan hak asasi manusia: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang fokus pada perlindungan hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur tentang proses persidangan kasus-kasus yang melibatkan hak asasi manusia. Masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan di Indonesia, antara lain peristiwa yang terjadi pada tahun 1965-1966, penembakan misterius tahun 1982-1985, Talangsari tahun 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, kekerasan paksa. penghilangan tahun 1997-1998, Wasior tahun 2001-2002, Wamena tahun 2003, pembunuhan Dukun tahun 1998, Peristiwa Simpang KAA tahun 1999, Jambu Keupok tahun 2003, Rumah Geudong tahun 1989-1998, Timang Gajah tahun 2000-2003, dan Kasus Paniai pada tahun 2014. Ada dua mekanisme untuk menangani pelanggaran HAM berat ini: yudisial dan non-yudisial. Pengadilan hak asasi manusia menangani penyelesaian melalui mekanisme peradilan, dan Komnas HAM mempunyai kewenangan untuk menyelidiki insiden tersebut. Meskipun upaya untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia telah dilakukan, penting untuk mengambil langkah lebih lanjut guna mencegah pelanggaran dan memastikan penyelesaian yang adil dan memuaskan jika pelanggaran tersebut terjadi. Untuk meningkatkan pentingnya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi dan meningkatkan kesadaran secara kolektif.

ABSTRACT

The issue of human rights violations in Indonesia remains a relevant and significant problem. These violations occur when the basic rights of individuals are ignored, not protected, or not enforced by the state or other institutions. In Indonesia, there are many cases of human rights violations that have not been adequately addressed or resolved. Amnesty International Indonesia reports that these serious violations are governed by the Rome Statute, an international treaty overseen by the International Criminal Court. However, Indonesia has not ratified the Rome Statute. At the national level, there are two laws that address human rights issues: Law No. 39 of 1999, which focuses on the protection of human rights, and Law No. 26 of 2000, which regulates the trial process for cases involving human rights violations. There are still many unresolved cases of gross human rights violations in Indonesia, including the events of 1965-1966, the mysterious shootings of 1982-1985, Talangsari in 1989, Trisakti, Semanggi I and II, the May 1998 riots, forced disappearances in 1997-1998, Wasior in 2001-2002, Wamena in 2003, the killing of shamans in 1998, the Simpang KAA incident in 1999, Jambu Keupok in 2003, Rumah Geudong from 1989-1998, Timang Gajah from 2000-2003, and the Paniai case in 2014. There are two mechanisms



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

for handling these gross human rights violations: judicial and non-judicial. Human rights courts handle resolution through judicial mechanisms, and the National Human Rights Commission (Komnas HAM) has the authority to investigate these incidents. Although efforts to protect human rights in Indonesia have been made, it is important to take further steps to prevent violations and ensure fair and satisfactory resolutions if they occur. To enhance the importance of enforcing and protecting the human rights of every individual, it is crucial for the government and society to collaborate and raise collective awareness.

Pendahuluan

Hak-hak individu yang dikenal dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah dan keberadaan manusia. Hak-hak ini diberikan kepada kita oleh kekuasaan yang lebih tinggi dan harus diakui, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, dan semua individu. Hal ini penting demi menjaga kehormatan, melindungi harkat dan martabat, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999).

Meskipun konsep hak asasi manusia dapat diterapkan secara universal, penerapannya harus mempertimbangkan aspek budaya dan tradisional masing-masing negara. Faktor-faktor seperti situasi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menjaga dan mendorong perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat kenyataan yang kontras, sehingga semakin jelas terlihat bahwa individu dengan latar belakang sosio-ekonomi rendah menghadapi hambatan besar dalam mencari keadilan dalam sistem hukum. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa praktik hukum di Indonesia diwarnai oleh diskriminasi dan bias yang jelas terhadap kelompok tertentu. Mereka yang mempunyai kemampuan finansial dengan mudah mendapatkan keadilan, sedangkan orang biasa jauh dari konsep keadilan. Pada dasarnya, keputusan pengadilan dapat diukur dalam bentuk uang, karena keringanan hukuman dalam sistem peradilan terutama dipengaruhi oleh jumlah uang yang terlibat, dibandingkan dengan upaya mencapai keadilan dan kebenaran.

Konsekuensinya adalah hilangnya tujuan dan kemerosotan ranah legalitas. Kemunduran sistem hukum suatu negara akan berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian, politik, dan budaya. Terlepas dari upaya yang dilakukan oleh para ahli di bidang ekonomi dan politik untuk mengatasi permasalahan dan kesenjangan, upaya mereka akan sia-sia jika gangguan hukum terus berlanjut. Oleh karena itu, hukum harus mempunyai peran penting dalam setiap aspek kehidupan negara.

Penggambaran yang berbeda-beda mengenai situasi ini menghadirkan beragam kekhawatiran masyarakat, khususnya penerapan perlindungan hukum dan hak asasi manusia secara selektif terhadap individu yang mempunyai pengaruh dan memiliki

kekayaan besar. Selain itu, dalam birokrasi pemerintahan, terdapat keyakinan umum bahwa jika suatu proses dapat ditunda, maka tidak perlu dilakukan percepatan.

Berbagai hal tersebut kemudian menimbulkan persoalan bagaimana implementasi penegakan hukum dan HAM di Indonesia, mengingat NKRI adalah Negara hukum yang wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakatnya secara menyeluruh tanpa adanya pengecualian.

Pembahasan

Penegakan dan Perlindungan HAM di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya setiap saat. Hukum diciptakan untuk mengendalikan dan menertibkan masyarakat serta memungkinkan semua badan hukum memenuhi kewajibannya dan memperoleh haknya. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya konflik. Perlindungan hukum yang represif ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan. Penegakan hukum adalah proses menjamin kelestarian dan efektifitas norma hukum yang nyata sebagai pedoman berperilaku di jalanan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus ditegakkan karena nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia, karena hak asasi manusia erat kaitannya dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya. Hak Asasi Manusia di Indonesia erat kaitannya dengan berdirinya negara Indonesia, khususnya Pancasila. Penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut adalah beberapa penyebab pelanggaran HAM di Indonesia:

1. Faktor Internal :

- a. Kondisi pelaku: Pelanggaran HAM dapat muncul dari kondisi pelaku sendiri yang mana timbulnya suatu sikap yang tercela dalam diri si pelaku, seperti sikap sombong dan egois yang dapat
- b. menimbulkan kelalaian akan hak-hak orang lain .
- c. Penyalahgunaan kekuasaan: Tidak jarang Pelanggaran HAM di Indonesia berasal dari kalangan elit politik yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, untuk memenuhi kepentingan mereka, seperti melenyapkan lawan politik atau korupsi.
- d. Sistem hukum yang tidak berjalan: Ketidak tegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran HAM juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kasus pelanggaran HAM di Indonesia

- e. Tingginya perilaku intoleransi: Tingginya tingkat intoleransi di Indonesia, seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dapat memicu kasus pelanggaran HAM dan mengancam stabilitas nasional .

2. Faktor Eksternal :

- a. Kondisi dan situasi negara: Pelanggaran HAM dapat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi negara, seperti konflik politik, kekerasan, atau ketidakstabilan sosial .
- b. Kondisi dan situasi lingkungan sekitar: Faktor-faktor lingkungan sekitar, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, atau ketimpangan ekonomi, juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM.

Penting untuk dicatat bahwa pelanggaran HAM adalah tindakan yang melanggar hak-hak dasar individu atau kelompok, baik oleh pemerintah, individu, atau kelompok lainnya. Penyelesaian pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui mekanisme yudisial (melalui pengadilan) dan non-yudisial (melalui lembaga seperti Komnas HAM) .

Bentuk Pelanggaran di Indonesia

Pelanggaran HAM di klasifikasikan menjadi dua yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Dan setiap tingkat pelanggaran memiliki bentuk hukuman yang berbeda.

1. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat antara lain:

- a. Kejahatan genosida: Penyediaan, penyusunan, dan penggunaan kekuatan militer, kekuatan politik, atau kekuatan ekonomi untuk menyebabkan masalah etnis, ras, religi, atau politik yang berpengaruh besar, seperti pengusiran, pembunuhan, atau penggunaan kekuatan untuk menyebabkan masalah etnis, ras, religi, atau politik yang berpengaruh besar.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan: Penyediaan, penyusunan, atau penggunaan kekuatan militer, kekuatan politik, atau kekuatan ekonomi untuk menyebabkan pengusiran, pembunuhan, atau penggunaan kekuatan untuk menyebabkan masalah etnis, ras, religi, atau politik yang berpengaruh besar.
- c. Penambangan ilegal yang mengancam kebebasan: Penambangan ilegal yang mengancam kebebasan, seperti penambangan di wilayah yang tidak diperbolehkan atau penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- d. Aksi mogok yang menuntut kepastian pekerja tanpa alasan: Aksi mogok yang menuntut kepastian pekerja tanpa alasan, seperti aksi mogok yang menghentikan kerja atau aksi mogok yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pelanggaran HAM berat dapat mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Hukuman yang di terima pun sepadan dengan apa yang telah di lakukan oleh pelaku pelanggaran HAM berat.

Hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada kasus dan peraturan yang berlaku. Namun, penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia masih menghadapi tantangan dan perlu ditingkatkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia antara lain:

- a. Penghambatan Penyelesaian Kasus: Proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti pengembalian berkas antara Komnas HAM dan Jaksa Agung yang memperlambat penuntasan kasus-kasus tersebut .
- b. Kurangnya Bukti dan Dokumen: Dalam beberapa kasus, kejaksan agung menyebutkan kurangnya bukti dalam penyelidikan atau hilangnya dokumen investigasi sebagai faktor yang menghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat .
- c. Keterlibatan Pejabat Pemerintah: Terdapat kasus di mana terduga pelaku pelanggaran HAM berat malah menjadi pejabat pemerintah, yang dapat menghambat penegakan hukum dan membuat pelaku sulit dihukum .

2. Pelanggaran HAM Ringan

Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun juga harus di tangani dengan serius Contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ringan antara lain:

- a. Kelalaian dalam memberikan penanganan kesehatan: Seorang pasien mendapatkan penanganan kesehatan yang tidak layak, seperti tidak menerima perhatian atau tidak menerima obat yang diperlukan.
- b. Pencemaran lingkungan secara sengaja: Seorang individu atau sekelompok mencegah seseorang dalam menikmati lingkungan yang sehat dan bersih, seperti membuang sampah di sana-sini atau membuat bunyi yang tidak diinginkan.
- c. Perundungan atau bullying di sekolah: Seorang siswa mendapatkan perundungan atau bullying dari siswanya, guru, atau pengurus di sekolah.
- d. Tidak memedulikan penyandang disabilitas: Seorang individu atau sekelompok tidak mempeduli atau tidak memperhatikan penyandang disabilitas, seperti tidak mendukung atau tidak membantu mereka.
- e. Mengucapkan kata-kata kasar kepada teman: Seorang individu mengucapkan kata-kata kasar atau tidak baik kepada teman atau keluarga.
- f. Mencegah seseorang dalam menjalankan ibadah: Seorang individu atau sekelompok mencegah seseorang dalam menjalankan ibadah atau kepercayaan mereka, seperti menghentikan ceramah atau menghapus tulisan ibadah.
- g. Melarang orang lain menyampaikan aspirasinya: Seorang individu atau sekelompok mencegah atau menghentikan seseorang dalam menyampaikan aspirasinya, seperti menghentikan ceramah atau menghapus tulisan aspirasi.

- h. Mencemarkan nama baik seseorang: Seorang individu atau sekelompok mencemarkan nama baik seseorang, seperti menulis atau mengucapkan sesuatu yang tidak benar atau tidak sebenar.

Pelanggaran HAM ringan tidak mengancam jiwa manusia, tetapi masih merugikan individu atau kelompok. Hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM ringan dapat bervariasi tergantung pada kasus dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM ringan di Indonesia.

Hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM ringan dapat bervariasi tergantung pada kasus dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM ringan di Indonesia. Pidana Denda: Pelaku pelanggaran HAM ringan dapat dikenai hukuman berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM ringan haruslah setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mendorong kesadaran akan pentingnya menghormati HAM. Sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan dan Saran

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) adalah serius dan tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat yang menghargai martabat manusia dan keadilan. Hal ini melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Untuk memahami pelanggaran HAM lebih dalam, referensi yang dapat digunakan adalah laporan dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International, Human Rights Watch, serta laporan dari lembaga PBB seperti Komisi HAM PBB. Referensi tersebut memberikan informasi mendalam tentang situasi hak asasi manusia di berbagai negara dan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Soelisyu, Hendry. (2011). "Plagiarisme; Pelanggaran Hak Cipta dan Etika." Yogyakarta: Kanisius.
- Utorodewo, Felicia N., dkk. (2010). "Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah." Jakarta: Badan Penerbit FKUI.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2002). "Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke tiga." Balai Pustaka. Jakarta.
- Random House Unabridged dictionary. (1997). "Intensiometer." [Artikel]. Tersedia di <http://www.infoplease.com/dictionary/intensitas>
- Soelistyo, H. (2011). "Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika." Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tim Hukumonline, Pelanggaran HAM: Pengertian, Jenis, dan Contohnya, 12 Desember 2022 (diakses pada tanggal 10 Maret 2024). <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-ham-lt618d10b275e29/?page=3>

Anugrahdwi, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Contohnya, 25 Agustus 2023(Diakses pada tanggal 10 Maret 2024). <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pelanggaran-hak-asasi-manusia-dan-contohnya/>